

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negara peran penduduk sangat penting sebagai salah satu modal dasar dalam tercapainya kualitas pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk yang berkualitas baik secara rohani maupun jasmani tentunya akan sangat membantu dalam tahapan pembangunan. Sebagai objek pembangunan, penduduk menjadi penikmat dari output akhir pembangunan, dan penduduk dapat mengambil peran sebagai individu yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Di Indonesia bertambahnya jumlah tenaga kerja memiliki tantangan yang cukup serius, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 275.773.800 jiwa di tahun 2022. Angka tersebut membawa Indonesia menempati urutan keempat dengan populasiterbanyak setelah India, Cina dan Amerika Serikat. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi peningkatan tenaga kerja.

Masalah ketenagakerjaan seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup dan penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi yang di tuntut oleh pasar kerja menimbulkan angka penangguran yang tinggi (Fitri, 2016).

Tingginya angka pengangguran menjadi permasalahan utama dalam sektor ketenagakerjaan. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tidak di barengi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai sehingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran menjadi masalah yang dapat mengganggu ekonomi suatu daerah karena hal ini akan menimbulkan masalah kemiskinan dan permasalahan sosial (Basuki, 2014).

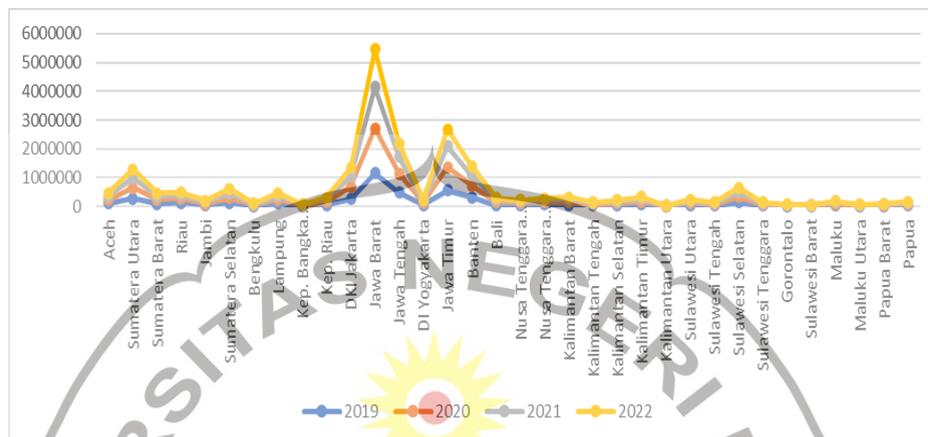
Menurut International Labour Organization (ILO) tingkat pengangguran adalah ukuran yang dimanfaatkannya tenaga kerja yang tersedia sehingga hal ini menggambarkan ketidakmampuan suatu perekonomian dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja atau tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Besarnya angka pengangguran dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi (ILO, 2010).

Pembangunan ekonomi di Indonesia dapat meningkat dengan adanya bonus demografi, pada tahun 2030-2040 Indonesia diprediksi akan mengalami masabonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi ini akan sangat menguntungkan apabila generasi yang ada memiliki kualitas yang baik serta terdapatnya lapangan kerja yang cukup maka bonus demografi ini akan menjadi beban bagi pemerintah Indonesia dan memunculkan permasalahan tenaga kerja.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki isu pengangguran terdidik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan pengangguran terdidik di Indonesia terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu

pengangguran menjadi aspek yang dapat menghambat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mengutip data Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dihimpun Bank Dunia, tingkat pengangguran angkatan kerja usia 15-24 tahun atau pengangguran anak muda di Indonesia mencapai 16% pada 2021. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengangguran anak muda tertinggi kedua di Asia Tenggara. Indonesia yang berpeluang untuk menikmati bonus demografi (demographic dividend) pada periode tahun 2020–2030 dihadapkan pada tantangan dengan tingginya angka pengangguran usia muda. Kelompok kaum muda (usia 15-24 tahun), menurut ILO membentuk hampir setengah pengangguran dunia, atau 88 juta jiwa dari 186 juta jiwa, meskipun pemuda hanya 25% dari populasi usia kerja di dunia.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja (2017) salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia adalah tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi atau disebut dengan pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik dinyatakan sebagai perbandingan jumlah pencari kerja yang berpendidikan tingkat (SLTA) dan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi (Sarjana dan Diploma) terhadap jumlah tenaga kerja. Berikut ini perkembangan pengangguran terdidik di Indonesia dalam 4 (empat) tahun terakhir di tahun 2019-2022 dapat dilihat dalam gambar grafik berikut ini:



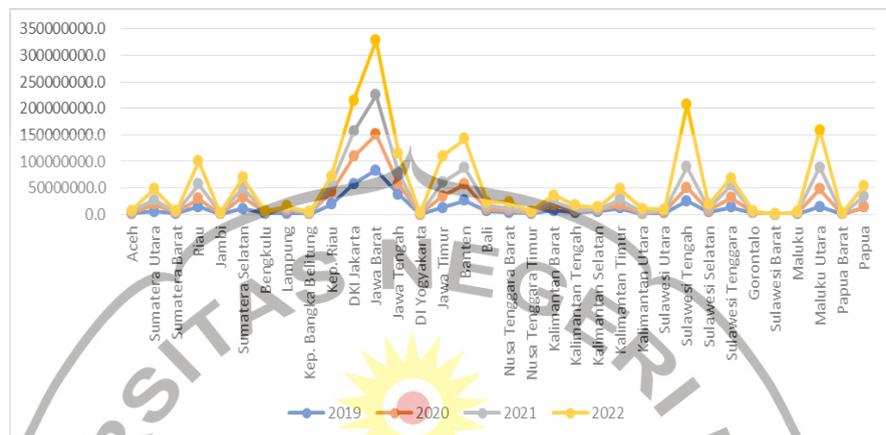
Gambar 1.1 Pengangguran Terdidik SLTA Keatas di Indonesia (Jiwa)

Berdasarkan gambar 1.1, diatas dapat dilihat bahwa kondisi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia setiap provinsi di tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Meskipun rata-rata tingkat pengangguran terdidik di Indonesia cenderung meningkat, namun disetiap provinsi pengangguran terdidik mengalami perbedaan yang cukup kontras antara satu dengan yang lain. Di tahun 2020, Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan jumlah pengangguran tertinggi sebesar 1.548.852 jiwa. Pengangguran terdidik yang cenderung meningkat di Provinsi Jawa Barat dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk di provinsi tersebut setiap tahunnya sehingga mengindikasi jumlah pengangguran terdidik juga bertambah. Angka tersebut cukup timpang bila di bandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki pengangguran terdidik terendah yakni masing-masing sebesar 64,194 jiwa dan 11,333 jiwa di tahun 2020. Rendahnya pengangguran terdidik di dua wilayah tersebut disebabkan oleh rendahnya jumlah penduduk, dan rendahnya tingkat pendidikan di masing-masing daerah tersebut hal ini yang menyebabkan tingkat pengangguran di dua wilayah tersebut rendah.

Dalam melihat faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik salah satu variabel yang kerap dikaitkan adalah Investasi. Investasi yaitu pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang- barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004). Investasi mejadi penambahan faktor-faktor produksi, di mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Harrod Domar (Mulyadi, 2003), teori ini menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Sehingga akan mempengaruhi penggunaan tenaga kerja karena semakin besarkapasitas produksi maka akan semakin besar pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Semakin tinggi nilaiinvestasi suatu daerah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pengangguran.

Di Indonesia investasi di sektor industri terus meningkat, hal ini menandakan Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri manufaktur nasional maupun global. Investasi setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai perkembangan investasi provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:

THE
Character Building
UNIVERSITY



Gambar 1. 2 Investasi Setiap Provinsi di Indonesia (Triliun Rupiah)

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa investasi di 34 provinsi di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan kemudahan perizinan atau non perizinan investasi meskipun terjadi krisis moneter pada tahun 2020-2021. Berdasarkan data di atas provinsi yang memiliki investasi tertinggi di tahun 2020 adalah provinsi Jawa Barat yakni Rp 82983146.2 triliun. Namun jika dilihat dari gambar 1.1 pengangguran terdidik Provinsi Jawa Barat masih berada pada angka paling tinggi yakni 1.548.852 jiwa. Sedangkan investasi terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara yakni Rp 967017.2 triliun, tetapi jumlah pengangguran terdidik ikut menurun yakni 11,333 jiwa, angka ini tergolong tinggi di antara provinsi lainnya.

Secara teori, investasi memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran terdidik, artinya peningkatan investasi dapat menurunkan pengangguran terdidik. Terlihat pada (gambar 1.2) bahwa investasi di beberapa provinsi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 di tiap-tiap Provinsi di Indonesia seperti di Jawa Barat sebesar 102875027.8 triliun, pengangguran terdidik pada tahun yang sama mengalami kenaikan dengan jumlah

154.852 jiwa, dan provinsi Kalimantan Barat sebesar 11736843.4 triliun, pengangguran terdidik mengalami kenaikan dengan jumlah 89.353 jiwa pada tahun 2022 dan provinsi lain juga mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dimana pada tahun yang sama pengangguran terdidik mengalami peningkatan (gambar 1.1). Seharusnya pada tahun tersebut kualitas pengangguran terdidik mengalami penurunan yang disebabkan naiknya investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri.

Hubungan antara investasi dengan pengangguran yakni investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya, semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi full employment. Dalam teori Harrod-Domar (Mulyadi, 2003) menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Investasi atau pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan- perusahaan untuk meningkatkan stok barang modal. Meningkatnya stok barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, sebab peningkatan stok barang modal akan meningkatkan kegiatan produksi dan meningkatkan kesempatan kerja, dengan tingginya kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran.

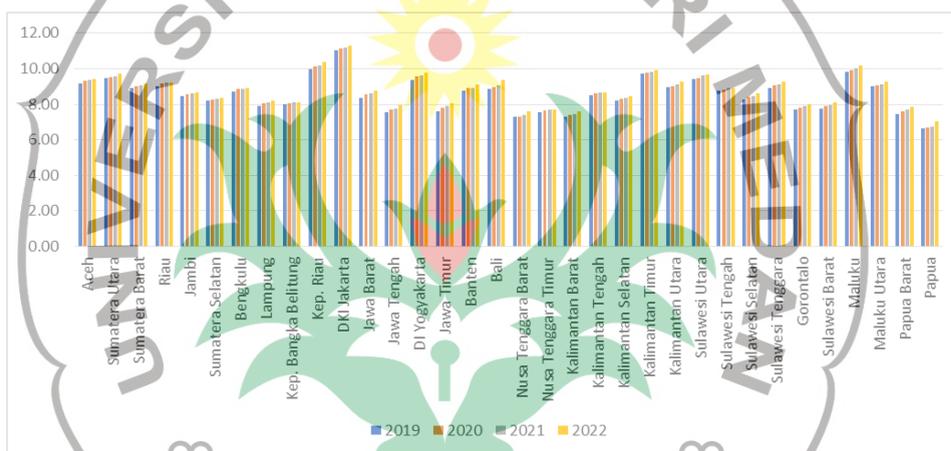
Kajian yang mengkaitkan antara pengangguran terdidik dengan investasi sudah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik, seperti penelitian sebelumnya Agustina & Wahyuni (2023).

Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya, Mukti Hadi Prasaja (2013), Linda Wahyuni dkk (2019), Rini Wulandari (2023), Farid Wahyu Aji Pratama (2022) menyimpulkan bahwa pengangguran terdidik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan pengangguran terdidik dengan investasi khususnya yang terjadi di setiap provinsi di Indonesia.

Selain Investasi, variabel pendidikan juga menjadi indikator yang mempengaruhi pengangguran terdidik. Todaro (2008) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang paling mendasar. Menurut Nasution dkk (2021), pendidikan umumnya merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas.

Pendidikan selalu menjadi wadah yang tepat dalam membina sumber daya manusia sebagai bentuk agenda pembangunan dan pembentukan masa depan suatu negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja profesional yang dapat memenuhi keperluan tenaga kerja suatu negara. Pengangguran sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Cahyani, 2014). Hal ini berarti jika mutu sumber daya manusia semakin tinggi maka penyerapan tenaga kerja juga meningkat sehingga mengurangi tingkat pengangguran terdidik. Meningkatnya mutu sumber daya manusia maka akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik, karena mutu sumber daya yang

dimiliki tamatan perguruan tinggi dengan keterampilan, pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki maka kesempatan kerja bagi penganggur terdidik sangat besar terserap di industri- industri besar. Berikut ini untuk mengetahui perkembangan Pendidikan yang ada di Indonesia dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah yang disajikan dalam bentuk gambar grafik dibawah ini:



Gambar 1. 3 Rata-rata lama sekolah Setiap Provinsi di Indonesia (Tahun)

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pendidikan melalui rata-rata lama sekolah di 34 provinsi yang ada di Indonesia selalu meningkat. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa penduduk semakin peduli dan menyadari pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kognitif yang lebih baik. Berdasarkan data diatas provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di tahun 2022 adalah Provinsi DKI Jakarta yakni 11,31 tahun, namun jika dilihat pada gambar 1.1 pengangguran terdidik di Provinsi DKI Jakarta masih berada di angka paling tinggi yakni 306,160 jiwa. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah adalah Provinsi Papua yakni 7,02 tahun tetapi Provinsi Papua menempati posisi terendah pengangguran terdidik yakni 38,686 jiwa.

Secara teori, meningkatnya pendidikan melalui rata-rata sekolah yang

ditempuh memiliki korelasi negatif terhadap pengangguran terdidik. Artinya semakin lama pendidikan yang ditempuh yang dilihat dari rata-rata lama sekolah maka akan menurunkan pengangguran terdidik. Berdasarkan pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa pendidikan melalui rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahun seperti provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2021 rata-rata lama sekolah adalah 9,13 tahun kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 9,25 tahun, diikuti dengan Provinsi Papua Barat juga mengalami peningkatan yakni tahun 2021 rata-rata lama sekolah sebesar 7,69 tahun menjadi 7,84 tahun di tahun 2022 dan provinsi lain juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, peningkatan ini berbanding terbalik dengan kondisi pengangguran terdidik di tahun yang sama justru mengalami penurunan (gambar 1.1). Seharusnya di tahun tersebut pengangguran terdidik mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah.

Peran penting dari pendidikan dalam kemajuan perekonomian adalah kemampuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dengan peningkatan pendidikan. Pendidikan kunci dalam kemampuan dari sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kemampuan tersebut untuk tumbuh menjadi negara maju (Todaro,2012).

Kualitas pendidikan sangat perlu bagi setiap penduduk, dikarenakan semakin banyak penduduk yang menempuh pendidikan, maka semakin tinggi produktivitas dan ekonomi nasional akan bertumbuh dengan baik. Selain itu,

seseorang yang berhasil menamatkan pendidikannya yang cukup untuk memasuki pasar tenaga kerja sektor modern mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dari pada seseorang yang tidak menamatkan pendidikannya (Todaro, 1993).

Kajian yang mengkaitkan antara pengangguran terdidik dengan pendidikan sudah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Seperti pada penelitian sebelumnya Musfira Nur dkk (2016), Sari (2011), dan Rosalina dkk (2018). Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya, Sundari dkk (2019) menyimpulkan bahwa pengangguran terdidik berpengaruh negatif terhadap pendidikan. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan pengangguran terdidik dengan pendidikan khususnya yang terjadi di setiap provinsi di Indonesia.

Selain faktor pendidikan, faktor lain yang juga kerap mempengaruhi pengangguran terdidik yaitu upah. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Kualitas seseorang yang semakin tinggi akan mempengaruhi kontribusinya terhadap perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin besar (Mankiw, 2000).

Upah cenderung memiliki pengaruh terhadap permintaan dan penawaran akan tenaga kerja, adanya perubahan upah yang terjadi mempengaruhi besar

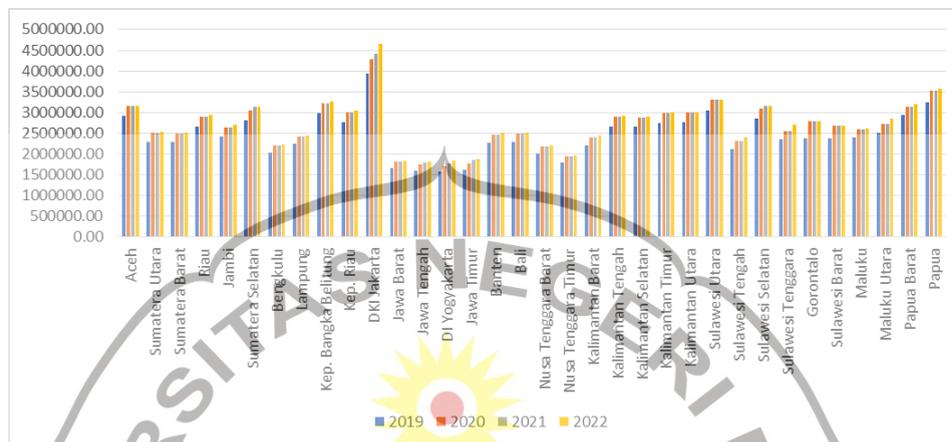
kecilnya penawaran tenaga kerja. Dalam teori Kaufman dan Hotckiss (1999) penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara akan memberikan dampak terhadap tingkat pengangguran sebab semakin tinggi besaran tingkat upah yang ditetapkan maka akan meningkatkan jumlah orang yang bekerja pada suatu negara tersebut.

Upah minimum yang meningkat mengakibatkan meningkatnya biaya produksi perusahaan. Apabila output yang diterima perusahaan tidak sesuai dengan input yang dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan akan menyesuaikan input tersebut dengan mengurangi jumlah pekerja yang digunakan atau menaikkan harga barang yang dijual. Kenaikan harga barang menyebabkan pembelian barang menurun, dan perusahaan perlu menurunkan tingkat produksi karena output yang diproduksi menurun, sehingga efek produksi akan mengurangi permintaan tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal yang terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran (Nicholson,2002).

Di Indonesia, penetapan upah minimum dilakukan dengan penuh pertimbangan di setiap tahunnya baik dari sisi perusahaan maupun tenaga kerja.

Upah minimum setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai perkembangan upah minimum provinsi di

Indonesia dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia (Rupiah)

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa upah minimum provinsi di 34 provinsi di Indonesia selalu meningkat. Peningkatan upah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah turut serta dalam menjamin terpenuhinya hak para pekerja dan memperhatikan standar upah yang layak. Berdasarkan data di atas, upah minimum provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari upah minimum provinsi yang terus meningkat sejak tahun 2019. Selama periode 2019-2022 Provinsi Jakarta menempati posisi pertama dalam peningkatan upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi Jakarta pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186 dan pada tahun 2022 Upah minimum provinsi sebesar Rp. 4.452.724 kenaikan upah minimum provinsi 2022 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu cara untuk menjaga daya beli pekerja.

Secara teori, upah yang cenderung meningkat memiliki hubungan yang positif dalam pengangguran terdidik. artinya peningkatan upah dalam suatu wilayah akan memicu naik turunnya pengangguran terdidik. Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa upah minimum provinsi mengalami peningkatan

yang cukup signifikan setiap tahun di 34 provinsi Indonesia seperti upah minimum provinsi Riau tahun 2021 adalah Rp 2.888.564 kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi Rp 2.938.564, diikuti dengan provinsi Kalimantan Selatan yang juga mengalami peningkatan dari Rp 2.877.448 di tahun 2021 menjadi Rp 2.906.473 di tahun 2022 dan provinsi lain juga mengalami peningkatan. Namun, peningkatan ini berbanding terbalik dengan kondisi pengangguran terdidik di tahun yang sama justru mengalami penurunan (gambar 1.1). Seharusnya di tahun tersebut tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan dikarenakan naiknya upah minimum provinsi.

Kajian yang mengkaitkan antara pengangguran terdidik dengan upah minimum provinsi sudah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Seperti pada penelitian sebelumnya Devia Sapitri (2018), Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya Febriyanti Husain, dkk (2023), Fitri&Junaidi(2016), dan Loura Auliya dkk(2022) menyimpulkan bahwa pengangguran terdidik berpengaruh negatif terhadap upah minimum provinsi. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan pengangguran terdidik dengan upah minimum provinsi khususnya yang terjadi di setiap Provinsi di Indonesia.

Berbagai pendapat ahli dan hasil riset empiris mengkaitkan antara investasi, pendidikan, upah dan pengangguran terdidik. Namun, beragam hasil riset peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan (research gap), bahkan

berlawanan dengan arah teori. Pengangguran terdidik masalah umum yang terjadi di masyarakat, maka masalah pengangguran terdidik dengan segala faktor-faktor yang mempengaruhinya ini semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya yang terjadi di setiap provinsi di Indonesia.

Berdasarkan serangkaian persoalan empiris, teoritis dan fenomena yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengangguran terdidik tiap-tiap provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dan tahun 2020 menjadi tahun dengan jumlah pengangguran terdidik tertinggi setiap provinsi di Indonesia.
2. Investasi yang mengalami peningkatan tidak selalu diikuti dengan jumlah pengangguran terdidik yang berkurang, dan adanya hubungan terbalik antara investasi dengan pengangguran terdidik. Secara teori, pengangguran terdidik berhubungan negatif terhadap investasi, sementara beberapa data menunjukkan bahwa pengangguran terdidik dengan investasi berhubungan positif, dan investasi yang mengalami peningkatan tidak selalu diikuti dengan jumlah pengangguran terdidik yang berkurang .
3. Pendidikan yang mengalami peningkatan tidak selalu diikuti dengan jumlah pengangguran terdidik yang berkurang, dan adanya hubungan terbalik

antara pendidikan dengan pengangguran terdidik. Secara teori, pengangguran terdidik berhubungan negatif terhadap pendidikan, sementara beberapa data menunjukkan bahwa pengangguran terdidik dengan pendidikan berhubungan positif, dan pendidikan yang meningkat di setiap provinsi di Indonesia belum mampu mengurangi jumlah pengangguran terdidik.

4. Upah minimum yang cenderung meningkat tiap provinsi belum mampu menyerap tenaga kerja dalam mengurangi jumlah pengangguran terdidik. dan adanya hubungan terbalik antara upah minimum dengan pengangguran terdidik. Secara teori, pengangguran terdidik berhubungan negatif terhadap upah minimum, sementara beberapa data menunjukkan bahwa pengangguran terdidik dengan upah minimum berhubungan positif.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah diberikan agar penelitian lebih terfokus dan terarah batasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen pengangguran terdidik serta variabel independen investasi, pendidikan, dan upah minimum provinsi, indonesia tahun 2019-2022
2. Data variabel yang digunakan merupakan data 34 provinsi yang ada di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap pengangguran terdidik di

setiap provinsi di Indonesia?

2. Apakah terdapat pengaruh pendidikan terhadap pengangguran terdidik di setiap provinsi di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh upah minimum provinsi terhadap di pengangguran terdidik setiap provinsi di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh investasi, pendidikan, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran terdidik setiap provinsi di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap pengangguran terdidik di tiap-tiap provinsi di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pengangguran terdidik di tiap-tiap provinsi di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap pengangguran terdidik di tiap-tiap provinsi di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi, pendidikan, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran terdidik di tiap-tiap provinsi di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Indonesia serta dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, memberikan bukti empiris tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Indonesia.
2. Bagi mahasiswa, sebagai informasi mengenai pengangguran terdidik khususnya mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian mengenai pengangguran terdidik lebih lanjut.
3. Bagi Universitas, untuk menambah referensi ilmu pengetahuan pada perpustakaan Universitas Negeri Medan untuk dijadikan bahan pembelajaran pada masa yang akan datang khususnya mahasiswa/i jurusan ekonomi.
4. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga tertentu tertentu dalam pengambilan keputusan.

THE
Character Building
UNIVERSITY